

**Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di  
Kabupaten/Kota Jawa Tengah  
Periode Tahun 2011-2016**

**JURNAL**



Disusun Oleh :

Nama : AnnisaDwi Rosalina  
Nomor Mahasiswa : 14313339  
Program Studi : Ilmu Ekonomi

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2018

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI  
KABUPATE/KOTA JAWA TENGAH  
PERIODE TAHUN 2004–2016**

**Annisa Dwi Rosalina**

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

e-mail : rossalina18.ra@gmail.com

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup kompleks yang di alami oleh masyarakat terutama masyarakat yang hidup dalam negara berkembang. Dalam mengatasi masalah kemiskinan ini tidak dapat dilakukan secara parsial saja namun juga harus menyakut berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Peenelitian ini bertujuan untuk menganalisi faktor-faktor yang mempengaruhi presentase penduduk miskin 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah periode tahun 2011-2016. Adapun faktor-faktor yang di duga dapat mempengaruhi presentase penduduk miskin di Jawa Tengah meliputi Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang terdiri dari data cross section (35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) dan data time series (2011-2016). Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel yang di lakukan dengan bantuan Eviews 8.

Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Inflasi, Pendidikan, dan UMK memiliki dampak yang negatif dan signifikan dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap presentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Variable Independent Inflasi, PDRB, Pendidikan, dan UMK secara bersama-sama berpengaruh terhadap penduduk miskin di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kata kunci: Inflasi, PDRB, Pendidikan, UMK, Kemiskinan

#### ABSTRACT

Poverty is one of the most complex problems experienced by people, especially people living in developing countries. In solving this problem of poverty can not be done partially but also must menyakut various aspects relating to the needs of the community. This study aims to analyze the factors that affect the percentage of poor population 35 districts / cities in Central Java period of 2011-2016. The factors that are expected to affect the percentage of poor people in Central Java include Inflation, Gross Regional Domestic Product (PDRB), Education, and District Minimum Wage (UMK). This study uses secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics consisting of cross section data (35 districts / cities in Central Java) and time series data (2011-2016). The method used in this research is panel data regression which is done with the help of Eviews 8. In this research yield conclusion that Inflation, Education, and UMK have negative and significant impact and PDRB have positive and significant influence to the percentage of poor people in Regency / City of Central Java. Variable

Independent Inflation, PDRB, Education, and UMK together affect the poor in 35 districts / cities in Central Java.

Keywords: Inflation, GRDP, Education, MSE, Poverty

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah guna meningkatkan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerja baru agar pengangguran di negara tersebut dapat berkurang sehingga kesejahteraan penduduk di negara tersebut dapat terwujud. Apabila suatu Negara ingin berhasil dalam proses pembangunan maka kualitas sumber daya manusia dan juga laju pertumbuhan penduduk harus ditingkatkan dan jika tidak diimbangi dengan perluasan lapangan pekerjaan maka akan berakibat pada pengangguran. Pengangguran yang tinggi pada suatu negara akan mengakibatkan tingginya kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu penyakit ekonomi pada suatu negara yang seharusnya dapat dihilangkan atau pun paling tidak dapat dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional, maka pengentasan kemiskinan membutuhkan keterpauan program. (Nasir, dkk 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi kebutuhan minimal ekonomi dalam hidupnya dan dalam arti populer kemiskinan dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurut

World Bank (2004), penyebab-penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan mereka. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya orang yang termasuk pada kategori miskin yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta rendahnya pendidikan dan kesehatan yang mereka miliki. Dalam mengatasi kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan dan permasalahan lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Dengan kata lain, pendekatannya harus dilakukan lintas sektor, lintas pelaku secara terpadu dan terkoordinasi dan terintegrasi.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning (2001), bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "capability deprivation" di mana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan.

Menurut laporan *Institut National Etudes Demographiques*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Namun Indonesia belum dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki pada negara tersebut. Masih banyak sumberdaya alam yang terbuang sia-sia begitu saja atau bahkan orang asing yang lebih dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia

karna kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan mengerti teknologi untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada tersebut. Padahal jika Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya yang ada maka Indonesia dapat menjadi negara yang maju. Karena hal tersebutlah yang akhirnya menjadikan Indonesia termasuk negara yang miskin.

Menurut ukuran jumlah penduduk miskin dan presentase penduduk miskin di Indonesia dari periode tahun 2014-2015 (table 1.1) yang terjadi juga mengalami kecenderungan naik dimulai dari tahun 2014 dengan jumlah presentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 10,96 persen dan sampai tahun 2015 menjadi 11,13 persen. Keberhasilan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan belum lah memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang cenderung tetap meningkat.

**Tabel 1.1**

**Tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2014-2015**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Presentasi Penduduk Miskin (%)			Garis Kemiskinan (rupiah)	
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + desa	Kota	Desa
2014	10.36	17.37	27.73	8.16	13.76	10.96	326 853	296 681
2015	10.62	17.89	28.51	8.22	14.09	11.13	356 378	333 034

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Dari hasil perhitungan di atas yang memperlihatkan kemiskinan yang ada di Indonesia semakin meningkat, maka pemerintah harus lebih berusaha dalam penanggulangan masalah kemiskinan yang ada secara berkelanjutan guna menekan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada September 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,73 juta orang (10,96 persen), berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25 persen), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46 persen). Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi di Jawa yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan kedua tertinggi setelah DIY Yogyakarta yaitu 13,45 dimana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai angka 13,58 dan di tahun 2015 sebesar 13,32. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2015 mencapai 4,577 juta orang, naik sekitar 15,21 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang sebesar 4,562 juta orang. Namun secara persentase penduduk miskin menurun menjadi 13,32 persen (tabel 2.1) .

**Table 1.3**  
**Tingkat Kemiskinan Di Pulau Jawa 2014-2015**  
**(Persen)**

Provinsi	2014	2015	Rata-rata
DKI Jakarta	4.09	3.61	3.85
Jawa Barat	9.18	9.57	9.375
<b>Jawa Tengah</b>	<b>13.58</b>	<b>13.32</b>	<b>13.45</b>
DI Yogyakarta	14.55	13.16	13.855
Jawa Timur	12.28	12.28	12.28
Banten	5.51	5.75	5.63

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik)

Meski lebih dari 20 ribu penduduk terangkat dari garis kemiskinan sejak awal tahun, Jawa Tengah tetap memiliki jumlah penduduk miskin terbesar kedua di pulau Jawa, yakni 4.505.780 juta. Batas pendapatan untuk kategori miskin di provinsi ini berkisar 310 ribu Rupiah per bulan. Hal tersebut disebabkan karena kurang nya tenaga yang handal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara optimal. Padahal Jawa Tengah merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam yang bisa di manfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus cepat mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Masalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi karena masih ada nya ketimpangan ekonomi antar wilayah yang ada di Jawa



Tengah. Hal ini disebabkan karena banyak faktor terutama masalah makro seperti inflasi, PDRB, pendidikan dan UMK. Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan barang umum secara terus menerus (Boediono, 1989). Bila dikaitkan dengan kemiskinan maka ketika inflasi mengalami peningkatan maka akan di barengi dengan naiknya garis kemiskinan bila tidak diikuti oleh peningkatan daya beli atau peningkatan pendapatan masyarakat terutama kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan rendah maka akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Dalam penelitian Profesor Kuznet dimana salah satu karakter pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Tondaro, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud disini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Tingginya output perkapita dan perubahan pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan tingkat kemiskinan yang ada saat ini. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor yang mendorong tinggi rendahnya tingkat kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pendidikan yang mereka miliki. Rendahnya pendidikan masyarakat akan berdampak kepada rendahnya keterampilan yang dimiliki yang kemudian dapat menurunkan produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas

yang rendah akan berdampak kepada rendahnya pendapatan. Sehingga ketika pendapatan masyarakat rendah akan menyebabkan rendahnya kualitas hidup masyarakat dan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan (Saputra, 2011).

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu upah minimum. Upah minimum yaitu standar upah yang digunakan oleh perusahaan dalam memberikan gaji kepada pekerja yang dimana upah minimum ditetapkan oleh pemerintah, namun dengan berbedanya kondisi di tiap wilayah menyebabkan perbedaan upah minimum pada tiap-tiap daerah. Ketika upah minimum di suatu wilayah rendah maka pendapatan masyarakat rendah dan hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya kemiskinan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota agar dapat diketahui faktor-faktor yang diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

## **PENELITIAN TERDAHULU**

Busra (2011), meneliti analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Aceh. Dalam penelitian ini, untuk melihat faktor yang mempengaruhi kemiskinan digunakan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan variabel tingkat pengangguran terhadap Fixe Effect Model

(FEM). Penelitian ini menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dikarenakan N besar dan T kecil selain itu bahwa unit cross-section yang kita pilih dalam penelitian tidak diambil secara acak maka kita harus menggunakan fixed effect. Hasil penelitian ini adalah variable PDRB dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pendidikan berpengaruh tetapi tidak signifikan dan secara bersama-sama ketiga variable berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Aceh.

Mustika (2011), meneliti pengaruh PDB dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tabulasi untuk menggambarkan perkembangan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan menghubungkannya dengan perkembangan besaran makro lainnya secara kuantitatif serta analisis regresi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh jumlah penduduk, dan produk domestik bruto terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan variable yang mempengaruhi kemiskinan yaitu variable jumlah penduduk, dan Produk domestik bruto. Hasil penelitian ini adalah variable PDB dan variable jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Rusdarti dan Sebayang (2013), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder yaitu jumlah penduduk miskin periode 2000-2004, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar nilai konstan, jumlah penduduk, pengangguran, dan data keuangan daerah (APBD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian

yang digunakan melalui pendekatan model regresi. Pada Pembahasan mencakup 2 aspek temuan yaitu: Pertama, pendekatan grafis sebagai pola fenomena kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, mengestimasi hubungan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan seperti Produk Domestik Bruto (PDRB), Belanja publik, dan pengangguran pada tahun 2007 dan temuan kedua teknik yang digunakan adalah pendekatan model regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, produk domestik regional bruto (PDRB), pengangguran, dan belanja publik terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini adalah PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran tidak signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, sementara itu belanja berpengaruh signifikan secara statistik terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah. Hasil ini menunjukkan masih dominannya belanja operasional/konsumsi pemerintah dengan orientasi belanja pegawai yang semakin tinggi menyebabkan rendahnya prioritas pada pelayanan publik. Perbedaan kota dengan kabupaten berpengaruh signifikan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah.

Putri (2013), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi data IPM, PDRB per kapita, dan belanja publik yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada periode tahun 2008-2012 dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah indeks

pembangunan manusia (IPM) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur, PDRB per kapita mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur, belanja publik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa timur.

Nizar, Hamzah dan Syahnur (2013) meneliti pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa data time series pada tahun 1980-2010. Pada penelitian tersebut yang menggunakan variable investasi asing langsung (FDI), investasi pemerintah, tenaga kerja, PDB, dan kemiskinan, bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan secara langsung, selanjutnya menganalisis pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana pengaruh estimasi pertumbuhan ekonomi hasil dari analisis variable investasi dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, FDI, investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, FDI, Investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Indonesia.

Barika (2013) meneliti pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatra. Variable independent yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Pengangguran dan Inflasi sedangkan variable dependent yang di gunakan adalah tingkat kemiskinan. Dimana studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh laju pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di di provinsi sumatra. Hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di sumatera. Hal dapat mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi relative kurang baik, yang antara lain disebabkan sebagian besar pertumbuhan ekonomi tersebut lebih ditopang oleh sektor konsumsi. Selain itu, kurang maksimalnya aspek pemerataan pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan pendapatan cenderung dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat saja. Selain itu pengeluaran pemerintah dan tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Sumatera. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negative, sementara, variable tingkat pengangguran terbukti berpengaruh secara positif.

Yusri (2016) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder berupa gabungan dari time series dan cross section dari tahun 2013-2014 dari 35 kabupaten di Jawa Tengah. Pada penelitian tersebut variable independent yang di gunakan yaitu indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan upah minumum sedangkan variable dependent yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu

kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah indeks pembangunan manusia dan upah minum berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Zuhdiyaty (2017) meneliti Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (studi Kasus Pada 33 Provinsi). Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder yang meneliti variable kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2011-2015 menggunakan analisis regresi panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi, TPT, dan IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap kemiskinan. Diantara ketiga variabel tersebut hanya variabel IPM yang berpengaruh terhadap kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang ada kurang berkualitas sehingga tidak mempengaruhi kemiskinan. Begitu juga dengan pengangguran bahwa tingkat TPT juga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, hal ini menandakan bahwa mereka yang menganggur belum tentu memiliki pendapatan yang rendah.

## **KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS**

## **1. Hubungan antara inflasi dengan kemiskinan**

Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*). Krisis moneter yang melanda negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter menyebabkan terjadinya *imported inflation* sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia.

Dan sesuai dengan kurva philip inflasi akan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengurangan jumlah pengangguran. Pada saat inflasi meningkat maka jumlah pengangguran yang ada pun akan berkurang dan apabila inflasi menurun maka pengangguran akan semakin meningkat. Ketika pengangguran menurun maka masyarakat akan mendapatkan pendapatan yang dapat menunjang kehidupan mereka. Saat masyarakat memiliki pendapatan yang baik maka konsumsi masyarakat akan lebih baik dan akan mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, sehingga hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Namun



hubungan inflasi dengan pengangguran ini hanya berpengaruh dalam jangka pendek saja.

## **2. Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan**

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat digunakan PDRB untuk alat analisis nya. PDRB sangat lah berpengaruh penting dalam kemiskinan di suatu daerah maupun daerah. Pertumbuhan yang meningkat akan menandakan bahwa suatu negara dapat dikatakan yang maju maupun berkembang, karena pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sangat berhubungan lurus dan pengaruh nya sangat kuat.

Sadono Sukirno (2000) mengatakan bahawa, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan ketika kenaikan PDRB tanpa memandang kenaikan itu lebih besar maupun lebih kecil. Namun pertumbuhan ekonomi tidak hanya semata-mata hanya mengenai kenaikan PDRB secara keseluruhan, namun juga bagaimana pendistribusian dana kepada masyarakat dan siapa saja yang telah menerima distribusi dana tersebut. Sehingga ketika PDRB menurun akan berdampak kepada menurun nya kualitas dan konsumsi rumah tangga. Dan ketika pendapatan masyarakat berkurang makan banyak rumah tangga yang menjadi miskin yang berakibat pada perubahan pola makanan pokok nya menjadi bahan pokok yang murah dan dengan jumlah yang berkurang.

## **3. Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan**

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang kompleks dalam masalah kemiskinan. Biasa nya suatu negara yang memiliki pendidikan yang

rendah juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Pendidikan yang rendah menjadikan sumber daya manusia yang ada juga menjadi rendah. Ketika sumber daya manusia rendah maka pendapatan masyarakat juga menjadi rendah, hal tersebut dikarenakan pada beberapa kriteria pekerjaan mengharuskan seseorang memiliki pendidikan yang baik untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka (Arsyad (2004)).

Dengan pendidikan yang baik, masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka jadikan bekal dan dapat mereka gunakan untuk mencari pekerjaan yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka (Ustama (2009)). Dengan demikian, pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan yang kemudian masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesejahteraan.

#### **4. Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan**

Ketika upah minimum dinaikan maka pendapatann tenaga kerja meningkat yang kemudian kehidupan masyarakat pun akan lebih sejahtera karena mereka dapat memperbaiki konsumsi mereka dan akan bebas dari kemiskinan. Namun ketika upah minimum naik maka perusahaan tidak dapat menampung pekerja yang banyak, maka hal tersebut dapat

meningkatkan pengangguran. Baik buruknya dampak upah minimum akan berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggabungan data *cross section* dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan *times series* dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, penulis mengumpulkan data dari data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai tahun publikasi.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan factor penting demi keberhasilan penelitian. Adapun menurut Anto Dajan (2001) menyatakan bahwa metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa sehingga angka-angka dapat diberikan pada obyek yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011 sampai 2016. Sebagai

pendukung, digunakan buku referensi, jurnal, syrat kabar, serta browsing website internet yang terkait dengan masalah Kemiskinan.

### **3. Definisi Operasional Variabel**

Variabel penelitian yang digunakan ada 4 variabel independen (bebas) dan variabel terikat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan. Untuk memperjelas pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu dirumuskan definisi operasional variabel, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kemiskinan**

kemiskinan adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam, dan mengurangi kualitas lingkungan. Data kemiskinan yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Persen).

#### **2. Inflasi**

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Data yang dipakai dalam penelitian adalah inflasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Persen).

### 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan pendapatan daerah berupa nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga pada tahun tertentu yang digunakan sebagai acuan tahun dasar, baik saat menghitung atau menilai biaya, produksi antara maupun komponen nilai tambah masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Rupiah).

### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran yang di turunkan dari generasi ke generasi guna memberikan pengetahuan, keterampilan dan mengajarkan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Data yang dipakai dalam penelitian adalah Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Persen)

### 5. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Upah Minimum Kabupaten yaitu upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan sudah termasuk tunjangan-tunjangan tetap. Yang di maksud tunjangan tetap yaitu jumlah upah yang di bayarkan perusahaan secara rutin setiap bulan

yang tidak ada kaitannya dengan pencapaian prestasi tertentu.. Data yang dipakai dalam penelitian adalah Upah Minimum Kabupaten dalam metode baru Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2016 (Dalam Rupiah).

#### 4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data serta dalam analisisnya menggunakan program *Eviews 8*. Data panel merupakan data gabungan antara data (*time series*) dan (*cross section*).

$$POV = \beta_0 + \beta_1 INF + \beta_2 PDRB + \beta_3 Pendidikan + \beta_4 UMK + \mu$$

Dimana:

POV = Persentase Penduduk Miskin ( Satuan Persen)

INF = Inflasi (Satuan Persen)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan  
(Satuan Rupiah)

Pendidikan = Angka Partisipasi Sekolah (Satuan Persen)

UMK = Upah Minimum Kabupaten (Satuan Rupiah)

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$  = Koefisien regresi berganda

$\mu$  = Variabel pengganggu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambar 1 Hasil Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	300.560663	(34,171)	0.0000
Cross-section Chi-square	862.457725	34	0.0000

Sumber: Data diolah eviews 8.0

Nilai distribusi Chi-square dari perhitungan menggunakan Eviews 8 adalah sebesar 862.457716 dengan probabilitas 0.000 (kurang dari 5%), sehingga model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

### Gambar 2 Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.192367	4	0.0001

Sumber: Data diolah eviews 8.0

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi-square sebesar 0.0001 yang artinya lebih kecil dari  $\alpha$  0.05 ( $0.0001 < 0.05$ ), maka dapat dilihat bahwa model yang baik untuk digunakan adalah fixed effect model (FEM). Dengan demikian berdasarkan uji Hausman dapat disimpulkan bahwa model fixed effect lah yang paling tepat untuk digunakan dalam menganalisis tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi, berdasarkan uji Chow dan uji Hausman model yang tepat digunakan adalah model *Fixed Effect* dari pada model *Random Effect*.

**Gambar 3 Uji Fixed Effect**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19.14377	0.375326	51.00574	0.0000
X1	-0.152705	0.017093	-8.933841	0.0000
X2	4.10E-08	1.29E-08	3.166224	0.0018
X3	-0.017028	0.007640	-2.228682	0.0271
X4	-4.40E-06	3.34E-07	-13.18823	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.987172	Mean dependent var	13.77600
Adjusted R-squared	0.984321	S.D. dependent var	4.504289
S.E. of regression	0.564011	Akaike info criterion	1.858500
Sum squared resid	54.39661	Schwarz criterion	2.480106
Log likelihood	-156.1425	Hannan-Quinn criter.	2.109792
F-statistic	346.2838	Durbin-Watson stat	1.503213
Prob(F-statistic)	0.000000		

Fixed Effects (cross)

Kabupaten Cilacap	-0.89107
Kabupaten Banyumas	4.167579
Kabupaten Purbalingga	6.838863
Kabupaten Banjarnegara	4.654889
Kabupaten Kebumen	7.91767
Kabupaten Purworejo	1.886769
Kabupaten Wonosobo	8.243206
Kabupaten Magelang	0.091624
Kabupaten Boyolali	-0.40818
Kabupaten Klaten	1.91876
Kabupaten Sukoharjo	-3.67151
Kabupaten Wonogiri	0.079373
Kabupaten Karanganyar	-0.17046
Kabupaten Sragen	1.888229
Kabupaten Grobogan	0.974293
Kabupaten Blora	0.8586
Kabupaten Rembang	6.938331
Kabupaten Pati	-1.28771
Kabupaten Kudus	-6.95976
Kabupaten Jepara	-4.69717



Kabupaten Demak	2.995636
Kabupaten Semarang	-4.68087
Kabupaten Temanggung	-1.49763
Kabupaten Kendal	-0.84546
Kabupaten Batang	-1.44409
Kabupaten Pekalongan	0.089209
Kabupaten Pemalang	5.102994
Kabupaten Tegal	-3.43131
Kabupaten Brebes	6.226004
Kota Magelang	-3.00495
Kota Surakarta	-2.12212
Kota Salatiga	-5.81268
Kota Semarang	-11.2178
Kota Pekalongan	-4.47886
Kota Tegal	-4.25037

*Sumber: Data diolah eviews 8.0*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa secara bersama-sama inflasi, PDRB, pendidikan, dan UMK memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebesar 98,7% dan sisanya sebesar 1,3% di pengaruhi oleh variable lain di luar model. Sedangkan untuk F-statistik mempunyai nilai probabilitas sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari alpha 0.05 ( $0.000000 < 0.05$ ), maka dapat dinyatakan inflasi, PDRB, pendidikan, UMK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Dari hasil penelitian yang sudah di lakukan terbukti bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika inflasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.152705.

Pada hakikat nya ketika laju inflasi meningkat maka akan meningkatkan juga batas garis kemiskinan. Ketika laju inflasi mengalami kenaikan hal tersebut

akan berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin apabila daya beli dan pendapatan tidak mengalami peningkatan juga terutama pada masyarakat yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun dalam penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat tersebut. Hal tersebut disebabkan karena adanya peningkatan daya beli masyarakat di Jawa Tengah sehingga kenaikan harga justru akan mengurangi penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah.

Pada dasarnya inflasi meningkatkan harga-harga seperti sandang, pangan dan papan, namun mayoritas penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah tinggal di desa dan inflasi tidak terlalu berdampak terhadap penduduk desa. Hal tersebut dikarenakan warga desa pada umumnya jarang sekali merenovasi rumah sehingga ketika harga bahan bangunan (papan) naik tidak akan terlalu memberatkan penduduk desa, dan ketika harga kain (sandang) naik juga tidak akan terlalu berpengaruh terhadap mereka karena bagi orang desa dalam membeli pakaian tidak terlalu sering seperti orang yang ada di kota dengan begitu ketika harga sandang naik maka tidak akan terlalu berpengaruh terhadap penduduk yang ada di desa. Dan pada permasalahan pangan mayoritas penduduk desa bercocok tanam sendiri sehingga ketika harga pangan naik mereka dapat mengambil hasil tanaman mereka sendiri.

Dan sesuai dengan kurva Philip inflasi akan menurunkan tingkat kemiskinan melalui pengurangan jumlah pengangguran. Pada saat inflasi meningkat maka jumlah pengangguran yang ada pun akan berkurang dan apabila inflasi menurun maka pengangguran akan semakin meningkat. Ketika

pengangguran menurun maka masyarakat akan mendapatkan pendapatan yang dapat menunjang kehidupan mereka. Saat masyarakat memiliki pendapatan yang baik maka konsumsi masyarakat akan lebih baik dan akan mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkan, sehingga hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Namun hubungan inflasi dengan pengangguran ini hanya berpengaruh dalam jangka pendek saja.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa PDRB berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika PDRB mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0,0000000041. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada yaitu semakin tinggi PDRB maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut bisa jadi disebabkan karena PDRB tidak mencerminkan pendapatan perkapita yang mengalami kenaikan namun ketika PDRB mengalami kenaikan hanya pendapatan perorangan saja yang mengalami kenaikan sehingga hal tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut menyebabkan PDRB tidak tersalurkan secara merata pada setiap masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan Cholili (2014) yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan terbukti bahwa Pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika Pendidikan mengalami

kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.017028. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada.

Penelitian Dores (2014) juga menjelaskan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penurunan kemiskinan. Ketika mutu pendidikan membaik maka akan meningkatkan ketrampilan dan produktivitas yang akan berdampak terhadap kenaikan kesempatan kerja. Ketika kesempatan kerja meningkat yang di dukung juga dengan peningkatan lapangan kerja dapat menyebabkan kenaikan pendapatan yang kemudian ada menurunkan tingkat kemiskinan yang ada.

Dari hasil penelitian yang sudah di lakukan terbukti bahwa UMK berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hal ini berarti ketika UMK mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,00000044. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada yang berarti ketika upah mengalami kenaikan maka akan menurunkan kemiskinan.

Ketika upah mengalami kenaikan maka akan menjadikan masyarakat dapat memnuhi kebutuhan hidup nya dan hal tersebut dapat menghindarkan masyarakat dari kemiskinan yang ada. Akan tetapi turun nya upah dapat menyebabkan naiknya tingkat kemiskinan karena penurunan upah dapat menaikkan harga-harga barang atau tidak sebanding dengan upah yang mereka terima.

Seperti yang di jelaskan oleh penelitian Yanthi dan Marhaeni (2015) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditentungan dengan pendapatan yang mereka terima. Kenaikan upah menguntungkan bagi pihak buruh/ pekerja dan pengusaha karena hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhir nya dapat menurunkan kemiskinan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang sudah di jelaskan di atas maka dapat di ambil kesimpulan :

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa PDRB berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah..
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa UMK berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Variable Independent Inflasi, PDRB, Pendidikan, dan UMK berpengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependent Tingkat Kemiskinan

## DAFTAR PUSTAKA

- Nizar Chairul, Hamzah Abubakar dan Syahnur Sofyan (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Volume 1, No. 2, Mei 2013. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Barika (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Infansi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera. Volume 05 Nomor 01, Januari-Juni 2013.
- Zuhdiyaty Noor (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *Jibeka* Volume 11 No 2 Februari 2017: 27 – 31. Universitas Brawijaya.
- Busra (2011). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh. Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mustika Candra (2011) Pengaruh PDB dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. Vol.1, No.4 Oktober 2011. Universitas Jambi, Kampus Pinang Masak.
- Rusdarti dan Karolina Sebayang Lesta (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Economia*. Volume9,Nomor1,April2013. Universitas Negri Semarang.
- Agustina Mega Puspitasari Putri (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Subri, Mulyadi (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta:PT. Raja

Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik. *Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi*. Jakarta: Badan

Pusat Statistik.

Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga,

Jakarta.

Arsyad, I, (2010). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN.

Boediono. (1989). *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2*.

Edisi 4, BPF, Yogyakarta.